

BAB III

GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang berada di dataran tinggi sehingga udara terasa sejuk. Kota Malang merupakan salah satu bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya bersama dengan Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata.

Kota Malang sebagai kota pendidikan, hal ini dikarenakan Kota Malang sendiri memiliki bermacam fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Kota Malang sebagai kota industri, industri di Kota Malang sangat beragam mulai dari skala kecil hingga skala besar. Industri skala kecil hingga menengah saat ini terus berkembang dengan adanya pembinaan, penanam modal, dan peningkatan mutu oleh Pemerintah Kota Malang. Sedangkan, industri skala besar terus diperkenalkan secara luas untuk mendukung produktivitas Kota Malang sebagai kota industri. Kota Malang sebagai kota pariwisata, potensi alam yang dimiliki kota Malang banyak mengundang para wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang berkunjung. Pemandangan alam yang elok serta hawa yang sejuk, teduh, dan

asri dengan bangunan kuno peninggalan Belanda memiliki daya tarik tersendiri. Berbagai pilihan tempat wisata, dan perbelanjaan baik yang bersifat tradisional maupun modern tersebar di berbagai penjuru. Berkat daya tarik tersebut Kota Malang memiliki banyak pendatang yang kebanyakan adalah pelajar/mahasiswa, pekerja, dan pedagang. Sebagian besar golongan pedagang dan bekerja berasal dari wilayah sekitar Kota Malang. Sedangkan untuk golongan pelajar dan mahasiswa banyak berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.¹¹⁴

1.1. Aspek Geografis Kota Malang

1.1.1. Keadaan Geografi

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut. Kota Malang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang yang secara astronomis terletak 112,06°-112,07° bujur timur dan 7,06°-8,02° lintang selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut¹¹⁵:

Sebelah Utara	:	Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
Sebelah Timur	:	Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
Sebelah Barat	:	Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang

¹¹⁴ Pemerintah Kota Malang. <http://malangkota.go.id/>. Diakses 10 Mei 2017.

¹¹⁵ Pemerintah Kota Malang. <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>. Diakses 6 Mei 2017

Berdasarkan deskripsi batas Kota Malang tersebut, menunjukkan bahwa Kota Malang terhubung secara strategis dengan Kabupaten Malang. Selain itu, letak Kota Malang juga berdekatan dengan Kota Batu. Keterhubungan ini, memberikan dampak mobilisasi kendaraan masuk/keluar yang besar di Kota Malang. Setiap kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang singgah atau berhenti sejenak di Kota Malang memerlukan tempat parkir. Dengan jumlah kendaraan masuk/keluar yang tidak dapat diperhitungkan secara pasti penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum kerap terjadi. Hal ini terkadang mengakibatkan kemacetan, dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Maka perlu adanya pengelolaan lahan parkir di tepi jalan umum untuk menjaga ketertiban lalu lintas.

1.1.2. Iklim

Kondisi iklim kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C-25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan stasiun klimatologi Karangploso curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

Kondisi iklim Kota Malang berbeda dengan kebanyakan kota lainnya, lingkungan yang memiliki udara sejuk dan asri memiliki daya tarik

tersendiri bagi para pendatang untuk berkunjung. Banyak dari kalangan pendatang baik dari golongan mahasiswa, dan wisatawan memilih Kota Malang sebagai tempat untuk melanjutkan studi, dan menjadi tempat untuk rekreasi dengan alasan bahwa iklim Kota Malang yang sejuk dan asri membuat rasa nyaman. Jadi, dapat dikatakan bahwa selain fasilitas pendidikan, dan tempat-tempat wisata yang disediakan Kota Malang, kondisi iklim yang dimiliki menjadi nilai plus untuk menarik para pendatang berkunjung ataupun menetap untuk sementara. Para mahasiswa yang berasal dari luar kota untuk memenuhi kebutuhan transportasi perkuliahan biasanya memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini menjadi salah satu penyebab jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang terus bertambah.

1.1.3. Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah kota malang antara lain :

- a) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
- b) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- c) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- d) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

Berdasarkan keadaan geologi Kota Malang yang letaknya berada di dataran tinggi mengakibatkan rendahnya penggunaan alat transportasi yang tidak menggunakan mesin seperti sepeda, becak, dan delman. Penggunaan

kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat menjadi alternatif pilihan dalam melakukan aktivitas. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor dibandingkan dengan penggunaan kendaraan tidak bermesin tentu mempengaruhi kebutuhan lahan parkir.

1.1.4. Luas Wilayah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kota Malang memiliki luas wilayah 110,06 km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan, dan 57 kelurahan.¹¹⁶ Lima kecamatan tersebut terdiri dari :

- a) Kecamatan Blimbing memiliki luas wilayah 17,77 km², dan memiliki 11 kelurahan.
- b) Kecamatan Klojen memiliki luas wilayah 8,83 km², dan memiliki 11 kelurahan.
- c) Kecamatan Kedungkandang memiliki luas wilayah 39,89 km², dan memiliki 12 kelurahan.
- d) Kecamatan Lowokwaru memiliki luas wilayah 22,60 km², dan memiliki 12 kelurahan.
- e) Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 20,87 km², dan memiliki 11 kelurahan.

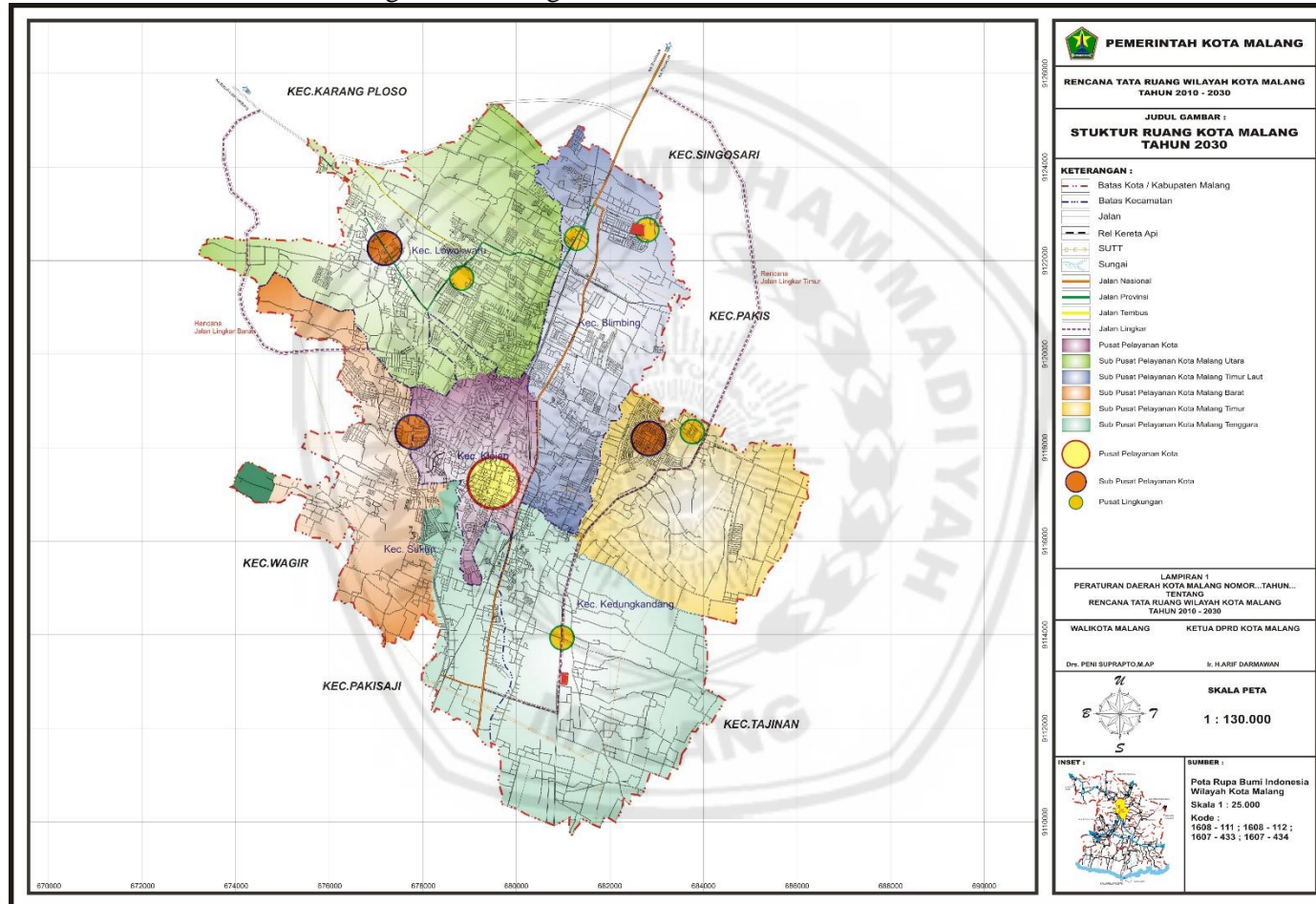
Pembagian wilayah yang terbagi menjadi lima kecamatan memiliki perbedaan pada tingkat perekonomian. Wilayah yang memiliki kawasan strategis pertumbuhan perekonomian yang tinggi salah satunya berada di Kecamatan Lowokwaru. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut terdapat tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas seperti universitas, mall, pasar,

¹¹⁶ Badan Pusat Statistik Kota Malang. <https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/425>. Diakses 8 Mei 2017.

dan tempat rekreasi lainnya. Selain itu, letak Kecamatan Lowokwaru juga dijadikan jalan utama untuk menuju Kota Batu. Maka kerap kali terjadi kemacetan pada wilayah tersebut baik dikarenakan kendaraan yang melewati Kota Malang menuju Kota Batu maupun kendaraan yang singgah untuk beristirahat.



Gambar 3.1 Peta Struktur Ruang Kota Malang Tahun 2030



Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang

1.1.5. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan Laporan Pertambahan Penduduk Bulan Desember 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang jumlah penduduk Kota Malang sebesar 895.387 jiwa yang terdiri dari 446.933 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 448.454 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 8.135 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 kecamatan (Klojen = 110.136 jiwa, Blimbing = 196.847 jiwa, Kedungkandang = 208.979 jiwa, Sukun = 206.612 jiwa, dan Lowokwaru = 172.813 jiwa). Kota Malang memiliki 278.427 Kepala Keluarga (KK), 536 unit Rukun Warga (RW), dan 4.011 unit Rukun Tetangga (RT).¹¹⁷

Tabel 3.1 Jumlah Kepala Keluarga (KK) per-kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1.	Blimbing	61.278
2.	Kedungkandang	35.739
3.	Klojen	63.580
4.	Lowokwaru	64.154
5.	Sukun	53.676
Jumlah		278.427

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Jumlah penduduk di Kota Malang mengalami pertambahan sebesar 11.943 jiwa, hal ini dapat dilihat dari Laporan Pertambahan Penduduk pada

¹¹⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/2016/12/lampid-2016/12/>. Diakses 10 Mei 2017.

bulan Januari 2016 sebesar 883.444 jiwa mengalami penambahan pada bulan Desember 2016 menjadi 895.387 jiwa.¹¹⁸ Hal ini dapat mempengaruhi penambahan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat di Kota Malang. Dengan jumlah kendaraan yang bertambah maka kebutuhan akan lahan parkir pun meningkat.

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang

2.1. Visi dan Misi

Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam mengelola bidang lalu lintas, angkutan, perparkiran, maupun dalam melakukan pengendalian dan ketertiban. Visi dari Dinas Perhubungan Kota Malang adalah “Terwujudnya sistem transportasi yang handal dan terintegrasi”. Sedangkan misi dari Dinas Perhubungan Kota Malang adalah meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib, dan nyaman. Sesuai dengan visi dan misi di atas, Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki lima citra manusia perhubungan yang meliputi :

- 1) Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman
- 3) Tangguh menghadapi tantangan
- 4) Terampil dan berperilaku gesit, jujur, ramah, sopan serta lugas
- 5) Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.

¹¹⁸ Ibid

Kelima hal tersebut menjadi pedoman bagi pejabat Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya. Pejabat Dinas Perhubungan dalam bekerja harus lebih mengedepankan pada sifat profesionalisme, taat terhadap hukum yang berlaku, integrasi tinggi, disiplin, dan bekerjasama untuk tetap memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi administrasi publik.

2.2. Tupoksi

Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki tugas pokok yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan. Sedangkan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Malang meliputi :

Tabel 3.2 Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang

No	Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang
1.	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan
2.	Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perhubungan
3.	Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi
4.	Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas
5.	Pengoperasian dan pemeliharaan terminal
6.	Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan
7.	Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas
8.	Pengembangan dan pengelolaan perparkiran
9.	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
10.	Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan
11.	Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan
12.	Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi

13.	Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan
14.	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
15.	Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
16.	Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
17.	Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan
18.	Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah
19.	Penyeleggaraan UPT dan jabatan fungsional
20.	Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
21.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan saat ini dipimpin oleh Bpk. Kusnadi, S.Sos. yang mengepalai sekretariat, empat bidang, dan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sekretariat Dinas Perhubungan terbagi menjadi sub bagian penyusunan program, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum. Sekretariat saat ini dikepalai oleh Ibu Dra. Muji Rahayu yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kepustakaan serta kearsipan. Sub bagian keuangan saat ini dikepalai oleh Ibu Baiq Nurlaili, SE, MM yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Sub bagian penyusunan program dikepalai oleh Ibu Hery Sulistyorini, SE. yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan

program, evaluasi, dan pelaporan. Sub bagian umum saat ini dikepalai oleh Ibu Ismungirah, S.Sos yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kepustakaan serta kearsipan.

Bidang lalu lintas saat ini dikepalai oleh Bpk. Agoes Moeliadi, ATD, MT. yang memiliki tugas untuk melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta pengelolaan sarana transportasi lalu lintas. Bidang ini memiliki dua kepala seksi yakni, seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan seksi sarana dan prasarana lalu lintas. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas saat ini dikepalai oleh Bpk. Edy Sukiswo, A.Ks, M.Si. yang memiliki tugas untuk melaksanakan manajemen, dan rekayasa lalu lintas jalan. Seksi pengelolaan sarana lalu lintas saat ini dikepalai oleh Bpk. Drs. Daryono yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas jalan.

Bidang angkutan saat ini dikepalai oleh Bpk. Ir. Ngoedijono, Ms.Tr. yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, angkutan hewan, dan angkutan khusus. Bidang ini memiliki tiga kepala seksi yakni seksi pelayanan angkutan dalam trayek, seksi pelayanan angkutan tidak dalam trayek, dan seksi perencanaan angkutan jalan. Seksi pelayanan angkutan dalam trayek saat ini dikepalai oleh Bpk. Heru Agus Triwibowo, SH. yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek. Seksi angkutan tidak dalam

trayek saat ini dikepalai oleh Bpk. Riko Indra Darmawan, SH. yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan barang, hewan dan angkutan khusus. Seksi perencanaan angkutan jalan saat ini dikepalai oleh Bpk. Heriono, S.Pd. yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan orang tidak dalam trayek.

Bidang perparkiran saat ini dikepalai oleh Bpk. Drs. Moch Syamsul Arifin yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir termasuk areal parkir di lingkungan pasar daerah. Bidang ini memiliki tiga kepala seksi yakni, seksi pemungutan, seksi perencanaan, dan seksi pengawasan dan pembinaan. Seksi pemungutan saat ini dikepalai oleh Bpk. Drs. Herbert Irianto Simomara, MM. yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir termasuk parkir di lingkungan pasar daerah. Seksi perencanaan saat ini dikepalai oleh Bpk. Hary Dwi Yuniarto, P.Si yang memiliki tugas untuk melaksanakan pendataan, perencanaan pengembangan, penataan, dan pengelolaan perparkiran. Seksi pengawasan dan pembinaan saat ini dikepalai oleh Bpk. Tigor Nainggolan, S.IP, MM. yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir termasuk areal parkir di lingkungan pasar daerah.

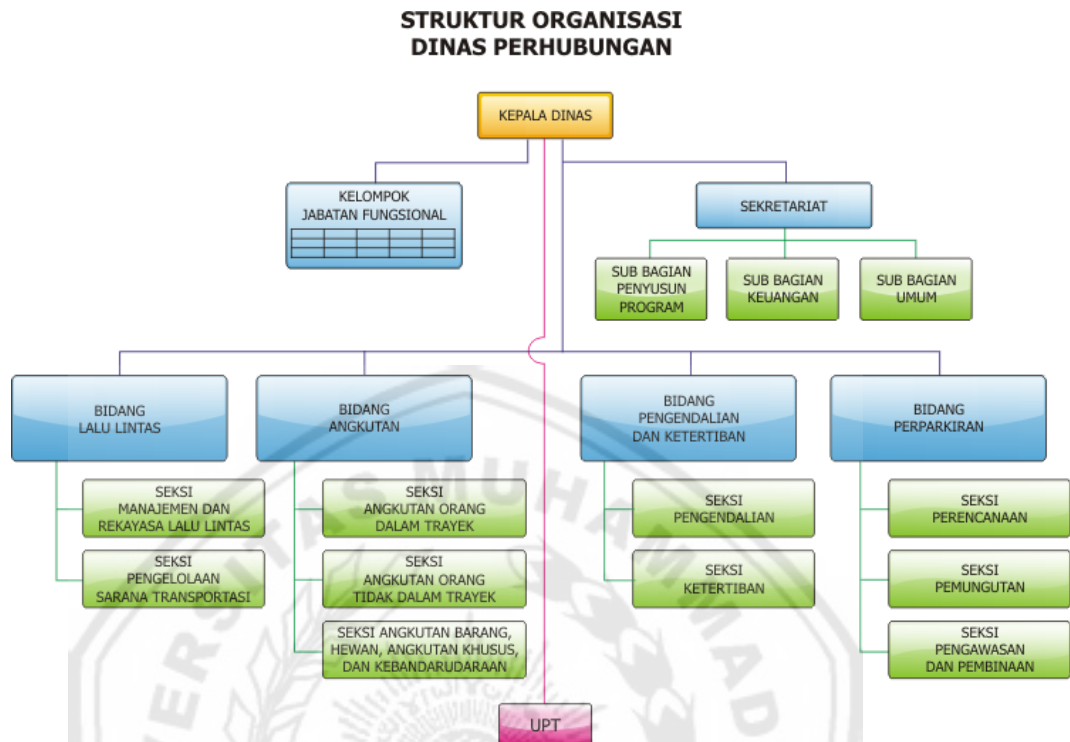
Bidang pengendalian dan ketertiban saat ini dikepalai oleh Bpk. Drs. G. Raymond Hatigoran, M.M.AP. yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah dalam rangka tertib berkendara di jalan. Bidang ini memiliki dua kepala seksi yakni, seksi pengendalian dan ketertiban angkutan orang, dan seksi pengendalian dan ketertiban lalu lintas. Seksi pengendalian dan ketertiban angkutan orang saat ini dikepalai oleh Bpk. Herry Santoso, SH. yang memiliki tugas untuk melaksanakan penertiban dalam rangka kelancaran dan keteraturan lalu lintas. Seksi pengendalian dan ketertiban lalu lintas saat ini dikepalai oleh Bpk. Edy Utomo yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengendalian dalam rangka kelancaran, keteraturan, dan keselamatan berlalu lintas.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan terbagi menjadi tiga yakni UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), UPT Terminal Arjosari dan Madyopuro, dan UPT Terminal Tlogomas, dan Mulyorejo. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini dikepalai oleh Bpk. Arisandy Satrio Anggoro, SH. M.Hum. yang memiliki tugas di bidang pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). UPT Terminal Arjosari dan Madyopuro yang saat ini dikepalai oleh Bpk. Hadi Supeno, SH. yang memiliki tugas di bidang terminal. UPT Terminal Tlogomas dan Mulyorejo saat ini dikepalai oleh Bpk. Drs. Imam Effendi, MM. yang memiliki tugas di bidang terminal. Fungsi sekretariat beserta sub bagian, bidang-bidang, dan UPT merupakan penjabaran dari masing-masing tugas pokok yang dimilikinya.

2.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang

Dalam penelitian ini fokus kajian berada di bidang perparkiran dengan melakukan wawancara, dan analisis data mengenai pengelolaan parkir Kota Malang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bidang perparkiran terbagi menjadi tiga seksi yakni seksi perencanaan, seksi pemungutan, serta seksi pengawasan dan pembinaan. Saat ini bidang perparkiran dikepalai oleh Bpk. Drs. Moch Syamsul Arifin yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir termasuk wilayah pasar daerah. Fungsi bidang ini adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perparkiran dengan melakukan hal-hal seperti perumusan, pengolahan data, penyusunan rencana, pelaksanaan program, pengkajian pengembangan, penataan, pemetaan lokasi,

dan penentuan lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir termasuk areal parkir di lingkungan pasar. Selain itu, pengelolaan fasilitas parkir, pemungutan retribusi parkir, pemrosesan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan parkir, pengawasan, pembinaan, dan penertiban pemungutan retribusi termasuk dari fungsi bidang perparkiran. Dalam pertanggungjawaban tugas bidang perparkiran, bidang ini juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPAA), Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengevaluasian, dan pelaporan tupoksi serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi pemungutan saat ini dikepalai oleh Bpk. Drs. Herbert Irianto Simomara, MM yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir termasuk areal parkir di lingkungan pasar daerah. Fungsi seksi ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan, penyiapan penyusunan rencana teknis, dan melaksanakan kebijakan teknis pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir termasuk areal parkir di lingkungan pasar daerah. Selain itu, pengelolaan fasilitas parkir, melaksanakan pengadministrasian/pembukuan hasil pemungutan retribusi parkir, pelaksanaan DPA, DPAA, SPP, SOP, SPI, SPM, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tupoksi serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tupoksi juga menjadi fungsi dan kewajiban seksi pemungutan.

Seksi perencanaan saat ini dikepalai oleh Bpk. Hary Dwi Yuniarto, S.Psi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pendataan, perencanaan pengembangan, penataan, dan pengelolaan perparkiran. Fungsi seksi ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana teknis penyelenggaraan, penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, pendataan potensi parkir, penyiapan bahan pelaksanaan kajian pengembangan, penataan, dan pelaksanaan perparkiran, penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan lokasi parkir, bahan rancang bangun fasilitas parkir serta bahan penentuan lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir termasuk areal parkir di lingkungan pasar daerah. Selain itu, perencanaan penentuan lokasi fasilitas parkir pada acara-acara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat, pelaksanaan DPA, DPPA, SPP, SOP, SPI, SPM, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tupoksi serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tupoksi juga merupakan fungsi dan kewajiban seksi perencanaan.

Seksi pengawasan dan pembinaan saat ini dikepalai oleh Bpk. Tigor Nainggolan, S.IP, MM. yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir termasuk areal parkir di lingkungan pasar daerah. Fungsi seksi ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program, penyusunan rencana teknis kegiatan pengawasan pembinaan perparkiran serta penertiban pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir termasuk areal parkir di lingkungan pasar daerah. Selain itu, pelaksanaan DPA,

DPPA, SPP, SOP, SPI, SPM, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tupoksi serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tupoksi merupakan fungsi dan kewajiban dari seksi pengawasan dan pembinaan.

3. Gambaran Umum Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD)

Kota Malang

3.1. Visi dan Misi

Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Malang memiliki visi “Menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga yang amanah dalam pelayanan publik.” Sedangkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang meliputi :

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah
- 3) Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah.

3.2. Tupoksi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang memiliki tugas pokok yakni melaksanakan pemerintahan di bidang

manajemen keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang meliputi :

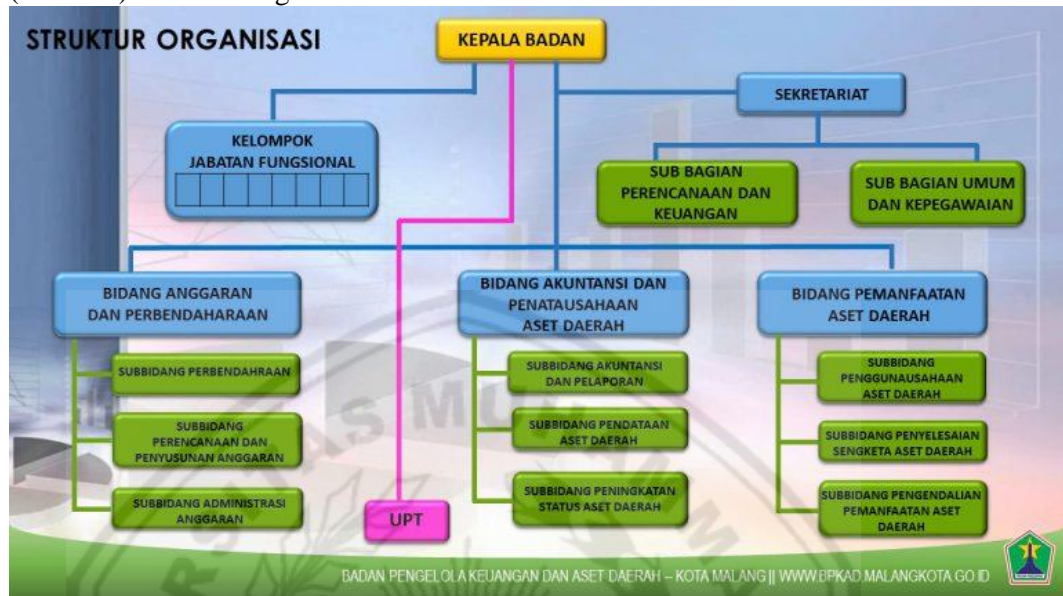
Tabel 3.3 Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

No	Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.	Penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah
2.	Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
3.	Pelaksanaan fungsi BUD; Penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
4.	Koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan/atau bukan Pajak
6.	Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan
7.	Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang
8.	Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
9.	Penatausahaan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
10.	Pengelolaan BMD yang menjadi kewenangannya
11.	Koordinasi penyelesaian sengketa pemanfaatan aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
12.	Pemberian dan pencabutan perizinan pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya
13.	Pemungutan retribusi daerah yang menjadi kewenangannya
14.	Pengelolaan administrasi umum
15.	Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
16.	Penyelenggaraan UPT

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang

3.3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang

Dalam penelitian ini data yang diperlukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah mengenai seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Hal ini ditujukan agar dapat melihat bagaimana perkembangan, peningkatan, perbandingan, dan realisasi dari penarikan retribusi parkir dari tahun ke tahun.

4. Gambaran Umum Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kota Malang

4.1. Visi, Misi, dan Tujuan

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kota Malang memiliki visi “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi

kesejahteraan masyarakat.” Sedangkan misi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kota Malang meliputi :

- 1) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yang merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya
- 3) Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah
- 4) Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Selain itu, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kota Malang memiliki tujuan yakni:

- 1) Menyediakan rencana pembangunan yang memadai
- 2) Penataan dan pengendalian ruang Kota
- 3) Peningkatan Perekonomian Daerah
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 5) Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang Kota serta dokumen pendukung lainnya
- 6) Mengembangkan laporan hasil pembangunan kota
- 7) Mewujudkan pelayanan administrasi

4.2. Tupoksi

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kota Malang memiliki tugas pokok untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kota Malang meliputi :

Tabel 3.4 Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Malang

No	Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang
1.	Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah
2.	Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah
3.	Penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS, dan PPAS Perubahan
4.	Penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
5.	Penyiapan dan penyusunan RTRW dan RDTRK
6.	Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan
7.	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
8.	Pelaksanaan pengukuran IPM
9.	Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya
10.	Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya
11.	Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya
12.	Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
13.	Pelaksanaan kerja sama perencanaan pembangunan antar daerah dan

	antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri
14.	Pelaksanaan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik
15.	Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan
16.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
17.	Pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD
18.	Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
19.	Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
20.	Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
21.	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
22.	Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP; Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
23.	Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan
24.	Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah
25.	Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
26.	Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
27.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kota Malang

4.3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Daerah (Barenlitbang) Kota Malang

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kota Malang



Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kota Malang.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Malang adalah mengenai rencana tata ruang wilayah Kota Malang dengan melihat bagaimana pola ruang, struktur ruang, dan penempatan kawasan strategis.